



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI SELASA, 23 APRIL 2013



DAFTAR ISI

Minyak Sawit	1
Pelindo II	2-3
Jalan Layang	4
Pertamina	5



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☐ Mar

☒ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☒ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Komoditas Minyak Sawit Penurunan Harga CPO Berlanjut	<div>- Secara teknis, pergerakan harga minyak sawit terpantau melemah, sebagaimana diperlihatkan pada garis jangka pendek yang bergerak turun</div> <div>- Pajak ekspor CPO nasional yang tinggi menancam daya saing di tingkat nasional</div>					

► KOMODITAS MINYAK SAWIT

Penurunan Harga CPO Berlanjut

JAKARTA—Kontrak berjangka komoditas minyak sawit mentah global memperpanjang penurunan harga hingga mencapai titik terendah dalam 4 bulan di level US\$744 per ton.

Pamuji Tri Nastiti & Giras Pasopati
redaksi@bisnis.co.id

Selama ini minyak sawit diperdagangkan pada kisaran diatas US\$750, yang mana batas harga itu sudah dinilai sebagai kontrak yang lemah. Di Bursa Malaysia Derivatives kontrak pengiriman Juli turun 1,4% menjadi 2.263 ringgit senilai US\$744 per ton.

“Secara teknis, pergerakan harga minyak sawit terpantau melemah, sebagaimana diperlihatkan pada garis jangka pendek yang bergerak turun, memberikan indikasi bahwa penurunan harga masih memiliki potensi kuat untuk terus terjadi,” kata analis teknikal PT Monex Investindo Futures Ariana Nur Akbar, Senin (22/4).

Periset itu menambahkan, posisi perdagangan awal pekan

► Secara teknis, harga minyak sawit terpantau melemah.

► Pajak ekspor CPO nasional yang tinggi mengancam daya saing di tingkat internasional.

ini juga terlihat dalam garis teknikal MACD atau garis indikator dan sinyal, yang memperlihatkan indikator harga yang bergerak turun.

Analisisnya menyatakan, apabila harga terpantau melemah maka kisaran support akan tercatat pada posisi 2.237 ringgit, 2.206 ringgit, dan 2.155 ringgit atau area dibawah US\$740. Sementara itu, jika harga bergerak pulih, maka kisaran resisten akan tercatat di 2.287 ringgit, 2.310 ringgit, dan 2.368 ringgit atau diatas US\$745.

Pantauan perdagangan kontrak crude palm oil (CPO) di bursa dalam negeri memperlihatkan koreksi harga Rp385 per kilogram untuk kontrak Mei. Data Bursa Komoditi dan Derivatif (BKDI) menunjukkan posisi harga Rp7.440 setelah berayun dari Rp6.975–Rp7.055 per kilogram.

Kontrak CPO berjangka untuk Juni hingga Agustus di BKDI bahkan berada di bawah harga Rp7.440 yang berarti harga itu dibawah harga kontrak Malaysia yang saat ini berada di area US\$744 per ton. Harga acuan global di Malaysia itu merupakan yang terendah untuk kontrak ter-

aktif sejak 14 Desember.

Menurut keterangan yang dilansir Bloomberg, ekspor CPO Malaysia turun 4,9% dari bulan sebelumnya menjadi 882.469 ton dalam 20 hari di bulan April. Sementara itu, perdagangan berjangka kehilangan 23% selama 2013 menyusul meningkatnya persediaan.

“Harapannya, jika ekspor minyak sawit tetap datar, ada kemungkinan persediaan bisa di bawah 2 juta ton,” ujar Alan Lim Seong Chun, analis Kenanga Investment Bank Bhd, seperti dikutip Bloomberg, Senin (22/4).

PAJAK EKSPOR

Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joefly Bahroeny mengatakan tingginya pajak ekspor atau bea keluar CPO nasional mengancam daya saing produk perkebunan itu di tingkat internasional.

Menurut Joefly persaingan secara ketat telah terjadi dengan Malaysia sebagai produsen utama kedua dunia ketika pasar global banyak lari ke negara itu karena pajak ekspor yang lebih rendah. Ini tercatat sejak April BK Indonesia antara 8%-22%, sedangkan Malaysia 4,5%.

“Tujuan pemerintah meningkatkan pajak ekspor CPO agar kebutuhan domestik diutamakan, tetapi hal ini mengancam persaingan terutama dengan Malaysia,” tegasnya.

Apalagi, lanjutnya, produksi



CPO Indonesia turun mencapai 27 juta ton per tahun, dimana kebutuhan CPO domestik hanya 4-5 juta ton. Artinya, hampir 70% harus dijual ke pasar internasional karena konsumsi dalam negeri belum tinggl.

Disisi lain Gapki optimistis produksi dan olahan sektor perkebunan kelapa sawit berpotensi cerah karena penggunaan minyak nabati dari CPO terus meningkat. Saat ini tercatat 38% diantaranya untuk kebutuhan dunia.

Minyak kelapa sawit jatuh ke level terendah dalam 4 bulan setelah spekulasi, adanya penurunan pengiriman dari Malaysia, produsen terbesar kedua di dunia, akan memperlambat laju penurunan stok negara.

Surveyor Intertek mengatakan cadangan turun ke level terendah dalam 7 bulan atau 2,17 juta ton pada Maret setelah pengiriman

naik untuk pertama kalinya dalam 5 bulan. Sementara itu, ekspor CPO Malaysia turun 4,9% menjadi 882.469 ton dalam 20 hari pertama bulan April dari bulan sebelumnya. Nilai kontrak berjangka turun 23% pada tahun 2012 karena stok naik.

Alan Lim Seong Chun, analis Kenanga Investment Bank Bhd mengatakan harapannya adalah jika ekspor minyak sawit dapat tetap datar dalam beberapa bulan, maka ada kemungkinan bahwa persediaan bisa di bawah 2 juta ton.

Minyak kelapa sawit curah untuk pengiriman September turun sebanyak 2,1% menjadi 5.994 yuan (US\$970) per ton di Dalian Commodity Exchange, level terendah untuk kontrak teraktif sejak November 2009, sedangkan minyak kedelai turun sebanyak 1,9% menjadi 7.474 yuan per ton, level terendah sejak Juli 2010. ■



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pelindo II Berlakukan Tarif Tunggal	<div><div>- PT. Pelabuhan Indonesia II memberlakukan tarif tunggal atau single billing terhadap pelanggan kargo impor berstatus less than container load melalui gudang lini 2 di Pelabuhan Tanjung Priok per 1 Mei 2013</div><div>- Fasilitas gudang yang telah diberlakukan sistem tarif tunggal kargo LCL itu disiapkan loket khusus dan ditempatkan sejumlah petugas guna melayani kegiatan penyelesaian dokumen dan pembayaran</div></div>				PT. Pelindo II	

Pelindo II Berlakukan Tarif Tunggal

JAKARTA-PT Pelabuhan Indonesia II memberlakukan tarif tunggal atau *single billing* terhadap pelayanan kargo impor berstatus *less than container load* melalui gudang lini 2 di Pelabuhan Tanjung Priok per 1 Mei 2013.

Kargo impor berstatus *less than container load* (LCL) merupakan kegiatan importasi yang dilakukan lebih dari satu pemilik barang dengan dimuat dalam satu kontainer dan butuh penanganan khusus atau pecah status saat barang dikeluarkan dari pelabuhan.

Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Tanjung Priok Sofyan Gumelar mengatakan uji coba tarif tunggal kargo LCL telah diterapkan di sejumlah gudang termasuk gudang milik PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan Dwipa Hasta Utama (DHU).

Menurutnya, fasilitas gudang yang telah diberlakukan sistem tarif tunggal kargo LCL itu disiapkan loket khusus dan ditempatkan sejumlah petugas guna melayani kegiatan penyelesaian dokumen dan pembayaran.

"Selanjutnya akan diimplementasikan ke semua fasilitas gudang yang ada di pelabuhan, sehingga awal bulan depan sudah berlaku penuh *single billing*," ujarnya kepada *Bisnis Senin* (22/4).

Sofyan menjelaskan mekanisme tarif tunggal kargo LCL itu yakni bekerja sama dengan pengelola terminal peti kemas di

Pelabuhan Tanjung Priok yang melayani kegiatan ekspor impor.

Dia menambahkan pola relokasi barang itu mengacu penanganan *overbrengen* peti kemas. "Jadi, pihak terminal peti kemas asal yang akan mendistribusikan ke gudang mana kargo LCL itu di relokasi," tuturnya.

Dengan pola kerja sama yang melibatkan terminal peti kemas asal dalam penanganan kargo LCL, dia meyakini bisa menekan biaya tinggi ekonomi yang selama ini dikeluhkan pengguna jasa dalam penanganan impor.

Dia menegaskan pengaturan kargo LCL itu tidak bermaksud menghilangkan peran *forwarder* konsolidator yang selama ini menjalani bisnis tersebut. "Kami hanya ingin tarif pelayanan di pelabuhan lebih efisien," tandasnya.

Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Achmad Ridwan Tonto menyatakan pihaknya mendukung penerapan tarif tunggal layanan kargo impor LCL di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurutnya, implementasi tarif tunggal bisa memangkas lebih dari 40% ekonomi biaya tinggi yang terjadi di pelabuhan tersebut di Indonesia itu.

"Selama ini, pelayanan LCL menimbulkan biaya tinggi di Priok. Bayangkan saja sebelumnya untuk mengeluarkan kargo 1 m³ pihak importir harus membayar sebesar Rp8 juta," ujarnya. *an*



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pelindo II Diminta Batalkan 22 Anak Usaha	<div>- PT. Pelindo II semestinya fokus membenahi biaya logistik yang tinggi di pelabuhan hingga menurunkan tingkat dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang masih 6 hari</div> <div>- Kadin bawa masalah dugaan monopoli Pelindo II ke DPR</div> <div>- Sekretaris Perusahaan PT.Pelindo II Yan Budi Santoso menyatakan permintaan pembatalan 22 anak usaha itu muncul sebagai akibat adanya kekhawatiran dari pelaku usaha</div>					

► PERSAINGAN USAHA

Pelindo II Diminta Batalkan 22 Anak Usaha

JAKARTA—Kadin Indonesia mendesak PT Pelabuhan Indonesia II mengurungkan langkah mendirikan 22 anak perusahaan yang bergerak di bidang pendukung usaha kepelabuhanan karena berpotensi memonopoli bisnis usaha itu.

M. Tahir Saleh
tahirsaleh@bisnis.co.id

Ketua Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Indonesia Irwan Ardi Hasman mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari seluruh asosiasi terkait yang mengejutkan langkah BUMN itu merambah sektor logistik, transportasi, dan pendukung usaha kepelabuhanan.

Menurutnya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II semestinya fokus membenahi biaya logistik yang tinggi di pelabuhan hingga menurunkan tingkat dwelling time di Pelabuhan Tanjung

Priok yang masih 6 hari.

"Mestinya swasta dan BUMN saling mendukung untuk menurunkan biaya logistik, kalau [swasta] sudah diadu dengan BUMN tentu itu tidak baik. Mestinya Pelindo II fokus pada kewajiban layanan publik," katanya Senin (22/4).

Irwan juga meminta Pelindo II fokus ke bisnis inti mengelola pelabuhan tanpa harus mendirikan hingga 22 anak usaha baru yang merambah jasa pendukung kepelabuhanan dan logistik.

Dia menyatakan langkah yang diambil BUMN itu berpotensi memonopoli bisnis dan mengancam kelangsungan usaha swasta di pelabuhan yang tidak

sebanding dalam hal persaingan usaha dengan perseroan yang disokong pemerintah.

Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mendesak pembatalan pendirian puluhan anak usaha Pelindo II karena berpotensi memonopoli usaha pendukung kepelabuhanan.

Dia juga mengindikasikan pendirian 22 anak usaha itu bisa mendapatkan keistimewaan.

"Kalau dulu Presiden Soekarno bilang bahwa kita akan menghadapi bangsa sendiri, itu benar, karena saat ini kami berhadapan dengan BUMN. Mestinya Pelindo II itu kelasnya berhadapan dengan BUMN asing," paparnya.

Dia menyatakan pihaknya sudah melapor hal itu kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi itu juga sudah menyatakan ada indikasi awal adanya persaingan usaha tidak sehat.

Tidak berhenti melapor ke KPPU, dia mengungkapkan pihaknya juga akan membawa masalah ini ke DPR pada

pekan ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Bambang K Rachwadi berharap Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino itu bisa mempertimbangkan kembali langkah pendirian anak usaha itu karena akan mengancam usaha swasta di pelabuhan.

Sampai saat ini, dia menuturkan jumlah perusahaan bongkar muat di Jakarta hanya 16 perusahaan sebagai dampak dari seleksi yang ada dari jumlah awalnya 129 perusahaan. Sebelumnya, total perusahaan APBMI di seluruh Indonesia mencapai 1023 perusahaan.

TIDAK MONOPOLI

Sekretaris Perusahaan PT Pelindo II Yan Budi Santoso menyatakan permintaan pembatalan 22 anak usaha itu muncul sebagai akibat adanya kekhawatiran dari pelaku usaha.

"Ini belum jalan. Sebetulnya ini karena kekhawatiran, padahal ada peluang untuk saling bermitra," katanya.

► PT Pelindo II diminta fokus turunkan dwelling time.

► Kadin bawa masalah dugaan monopoli Pelindo II ke DPR.

Dia menilai tidak ada niat perseroan untuk mematikan usaha swasta atau mitra bisnis di pelabuhan yang selama ini sudah berjalan.

Menurutnya, pendirian anak usaha yang bergerak di bidang sewa peti kemas, penyediaan alat, dan sistem informasi itu bertujuan meningkatkan efisiensi di pelabuhan.

"Kami dirikan anak usaha itu ya memang untuk mendukung core business kami yakni untuk meningkatkan produktivitas pelabuhan, efisiensi, dan ini nanti akan ditunjang dengan keberadaan anak usaha," ungkapnya.

Yan Budi menilai pendirian anak usaha itu sebetulnya tidak melawan hukum karena sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. ▢



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☒ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Anggaran Jalan Layang Habis	<div>- Pemprov DKI meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengaudit proyek yang seharusnya sudah rampung pada 2012 ini</div> <div>- Selain mengetahui detail penggunaan anggaran proyek ini, pemeriksaan dari BPK dan BPKP bertujuan untuk melihat adanya indikasi wanprestasi</div>					

Anggaran Jalan Layang Habis

Pemprov DKI meminta proyek jalan layang Kampung Melayu-Tanah Abang segera diaudit.

KEBON SIRIH — Proyek Jalan Layang Nontol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang akan terhenti sementara. Pemprov DKI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek yang seharusnya sudah rampung pada 2012 ini.

Terhitung 1 Juni 2013, pengerjaan fisik jalan layang yang menghubungkan Kampung Melayu-Tanah Abang-Casablanca akan dihentikan sementara. Padahal proyek ini tinggal 10 persen lagi selesai.

“Ada masalah sedikit di penganggaran, nanti diambilkan dari APBD Perubahan,” kata Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) di Balai

Kota, Senin (22/4). Akibat dari penganggaran yang meleset ini, target selesai proyek ini kembali mundur.

JLNT tersebut ditargetkan selesai pertengahan tahun. Tahun lalu JLNT ini sempat terkendala adanya pipa air baku yang tak bisa dipindahkan. Akibatnya, sempat terjadi perubahan konstruksi dari desain awal di ruas Jalan Prof Dr Satrio.

“Silakan tanyakan kepada Dinas PU mengapa belum selesai, tetapi anggaran sudah habis,” ujarnya.

Selain itu, Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mendesak agar diadakan audit atas proyek ini. Ahok menegaskan bahwa alasan proyek tersebut tidak masuk anggaran 2013 adalah karena memang seharusnya proyek ini sudah selesai.

Pergantian kepemimpinan di Jakarta, kata Ahok, menjadi penyebab awal tidak dianggarkannya lagi proyek ini. Ia pun mengindikasikan

adanya penyimpangan dalam proyek senilai Rp 2 triliun lebih itu. Jika ada ketidakberesan dalam proyek ini dan diteruskan oleh pemerintah yang sekarang, Ahok meminta jangan sampai gubernur sekarang yang menanggung akibatnya.

“Sekarang harus dihentikan sambil melihat hasil auditnya,” katanya.

Selain mengetahui detail penggunaan anggaran proyek ini, pemeriksaan dari BPK dan BPKP bertujuan untuk melihat adanya indikasi wanprestasi yang menyebabkan proyek itu tidak selesai tahun lalu. Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sarwo Handayani mengaku ia yakin sudah ada pos anggaran untuk proyek ini. “Tidak mungkin tidak dianggarkan, pasti dianggarkan dong proyek itu,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Sayogo Hendrosbroto mengatakan Pemprov

DKI harus tetap melanjutkan proyek ini. “Kalau ingin menghentikan, dasarnya harus jelas,” ujarnya. Terlebih dalam APBD 2013 sebenarnya masih ada anggaran Rp 101,5 miliar untuk penyelesaian proyek ini.

Namun Sayogo mengakui permintaan wagub untuk menghentikan proyek dapat dibenarkan. Namun sangat disayangkan jika proyek yang hampir jadi itu terpaksa dihentikan.

JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang yang hingga kini belum selesai berlokasi *Underpass* Jalan Sudirman. Tepatnya, di atas *shelter busway* koridor 1 Karet. JLNT ini terbagi dalam tiga paket, yaitu paket Casablanca, paket Prof Dr Satrio, dan paket Mas Mansyur. Paket yang disebut terakhir itulah yang belum selesai. Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna meminta jangan sampai proyek ini mangkrak seperti tiang monorel. ■ c72 ed: wulan tunjung palupi



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Proyek Petrokimia Pertamina Usaha Patungan Siap Dibentuk	<div>- PT. Pertamina (Persero) menargetkan pembentukan perusahaan patungan proyek petrokimia dengan PTT Global Chemical Public Company Limited akan direalisasikan pada 10 Desember 2013</div> <div>- PertaminaPTT masih membahas kapasitas produksi komposisi saham dan lokasi kilang minyak</div> <div>- Kilang bisa diintegrasikan dengan bisnis petrokimia untuk memberikan nilai tambah</div>					

► PROYEK PETROKIMIA PERTAMINA

Usaha Patungan Siap Dibentuk

JAKARTA—PT Pertamina (Persero) menargetkan pembentukan perusahaan patungan proyek petrokimia dengan PTT Global Chemical Public Company Limited akan direalisasikan pada 10 Desember 2013.

Riendy Astria
riendyastria@bisnis.co.id

Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto mengatakan kedua perusahaan kini membahas pembentukan perusahaan patungan tersebut, setelah menandatangani pokok-pokok perjanjian (*head of agreement/HoA*) pembangunan kompleks petrokimia beberapa waktu lalu.

Rencananya proyek itu akan dibangun di salah satu kilang milik Pertamina yang sudah beroperasi. Pilihan kuatnya, yakni di

kompleks kilang Plaju, Palembang, atau kilang Balongan, Jawa Barat.

"Kami sedang membahas pembentukan anak perusahaan dari perusahaan patungan ini, *Insyallah* pada 10 Desember terbentuk," katanya, Senin (22/4).

Dalam pembahasan tersebut, dibicarakan juga mengenai studi kelayakan, termasuk penentuan kapasitas produksi, komposisi saham perusahaan patungan, dan lokasi kilang yang akan menghasilkan produk olefin dan polimer itu.

Setelah perusahaan patungan terbentuk, lanjut Chrisna, dibutuhkan waktu sekitar 4—5 tahun hingga kilang dapat beroperasi.

"Setelah studi kelayakannya rampung, kemudian bangun pabriknya, itu butuh paling cepat 3 tahun. Jadi, paling tidak, pabrik beroperasi 4—5 tahun lagi."

NILAI TAMBAH

Pembangunan kompleks petrokimia itu diperkirakan menelan investasi US\$4 miliar—US\$5 miliar. Kilang berpotensi diintegrasikan dengan bisnis petrokimia, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar. Setelah kilang terbangun, Pertamina menargetkan dapat menguasai 30% pasar domestik.

Pertamina saat ini mengoperasikan enam unit kilang pengolahan dengan total kapasitas produksi sekitar 1 juta barel minyak mentah per hari.

Kilang itu yakni Dumai, Riau,

berkapasitas 170.000 barel per hari, Plaju 118.000 barel per hari, Cilacap, Jawa Tengah, 348.000 barel per hari, Balikpapan, Kalimantan Timur 260.000 barel per hari, Balongan 125.000 barel per hari, dan Kasim, Papua Barat, 10.000 barel per hari.

PTT Global merupakan produsen petrokimia terbesar di Thailand dengan total kapasitas produksi 8,45 juta ton per tahun dan kapasitas penyulingan minyak mentah 280.000 barel per hari.

Edi Hermantoro, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan pihak swasta perlu dilibatkan untuk mendanai pembangunan kilang guna menghasilkan bahan bakar minyak dan aromatik sebagai produk akhirnya.

Menurutnya, jika kilang dapat menghasilkan BBM dan aromatik, margin yang dihasilkan akan lebih besar. Oleh karena itu, swasta perlu dilibatkan untuk

► Pertamina-PTT masih membahas kapasitas produksi, komposisi saham, dan lokasi kilang.

► Kilang bisa diintegrasikan dengan bisnis petrokimia untuk memberikan nilai tambah.

mendanai pembangunan proyek kilang yang cukup mahal itu.

"*Trak kan* memasok minyak mentah, bisa saja nanti *joint investment* dengan Irak di proyek kilang. Jadi kerja sama yang dijalankan akan menggunakan skema pemerintah-swasta," katanya.

Edi mengatakan dalam pembangunan kilang, salah satu insentif fiskal yang masih sulit untuk disetujui oleh Kementerian Keuangan adalah permintaan pembebasan bea masuk dan pajak (*tax holiday*) selama 20 tahun. (35) **2**